

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN GROBOGAN” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan tertib usaha dan tertib lingkungan di Kabupaten Grobogan dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dengan rumusan masalah mencakup bagaimana pelaksanaan fungsi tertib usaha dan tertib lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan kendala dalam melaksanakan fungsinya beserta dengan cara mengatasi kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang mengandalkan tindakan represif dan tindakan non-yustisial, tindakan non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. Namun, sebelum dilakukan tindakan non-yustisial, upaya represif guna pencegahan pelanggaran juga dilakukan salah satunya dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi daerah terkait dengan penegakan ketertiban umum, utamanya dalam penelitian ini ialah tertib usaha dan tertib lingkungan.

Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja ketika bertugas adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih saja mengabaikan peraturan yang sudah terang disampaikan langsung oleh petugas, selain itu hambatan yang dihadapi oleh petugas adalah terkadang masih terdapat pedagang kaki lima yang bersikeras menolak patuh ketika ditertibkan. Solusi atas hambatan tersebut diatasi dengan tetap giat melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui penyuluhan dengan tetap mengutamakan empati supaya penyampaian oleh petugas dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci: Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja, Ketertiban Umum

ABSTRACT

The research entitled "IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT ACCORDING TO REGIONAL REGULATION OF THE GROBOGAN DISTRICT NUMBER 15 OF 2014 CONCERNING PUBLIC ORDER IN GROBOGAN DISTRICT" aims to determine the implementation of the duties and functions of the Civil Service Police Unit in realizing business orderly and in an orderly environment in Grobogan Regency. Grobogan Regency Regional Regulation Number 15 of 2014 concerning Public Order with problem formulations include how to carry out an orderly business function and environmental order by the Civil Service Police Unit and obstacles in carrying out its functions along with how to overcome the obstacles faced. The method used in this research is juridical empirical and the type of data used in this study is primary data, namely data obtained by a researcher directly from the source without intermediary other parties.

The Civil Service Police Unit in carrying out its duties and functions is guided by the Regional Regulation of Grobogan Regency Number 15 of 2014 Concerning Public Order which relies on repressive actions and non-judicial actions, non-judicial actions are actions taken by the Civil Service Police Unit in order to protect and / or restoring public order and public tranquility against violations of regional regulations in accordance with the provisions of statutory regulations and not until the judicial process. However, before non-judicial actions were taken, repressive efforts to prevent violations were also carried out, one of which was by disseminating information to the public regarding local regulations related to enforcement of public order, especially in this research, orderly business and orderly environment.

The obstacles faced by the Civil Service Police Unit when on duty are the level of public awareness that still ignores the rules that have been clearly conveyed directly by the officers, besides that the obstacles faced by officers are that sometimes there are street vendors who insist on refusing to obey when they are put in order. The solution to these obstacles is overcome by continuing to actively approach the community through counseling while still prioritizing empathy so that delivery by officers can be well received by the community.

Keywords: Function, Civil Service Police Unit, Public Order